

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Transmigrasi dan Pengairan*, Alumni, Bandung, 1999.
- Admani Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- A.P. Parlindungan, *KomentaAtasUndang-UndangPokokAgraria*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia/, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrari, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesepuluh, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Bruce Patton, *The Handbook of Dispute Resolution*, Jossey-Bass, San Fransisco, 2005.
- E Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cetakan keenam, Ihtiar Baru, Jakarta, 1959.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cetakan ke-2, Bandung:PT. Alumni, Hal. 40Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013.
- Elsa Syahrief, *Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012.
- Farida Patittingi, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Rangkaian Education, Yogyakarta, 2012.
- Hutagalung, Ari. S, *Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi*, Badan Penenrbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visi Media, Jakarta, 2011.

- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Media Group, Jakarta, 2004.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan AntaraRegulasi dan Implementasinya*, Buku Kompas, Jakarta, 2005.
- Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003,.
- Mudakir Iskandar syah, *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, BhuanailmuPopuler, Jakarta, 2019.
- Nurus Zaman, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Madura, 2016.
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prih Harjadi Dkk, *Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia*, Direktorat Mitigasi, Jakarta, 2007.
- Soedharyo Soimin, *Status HakdanPembebasan Tanah*, SinarGrafika, Jakarta, 2004.
- Salaman Maggalatung dan Amrizal Siagian, *Pengantar Studi Antropologi Hukum Indonesia*, Press Uin, Jakarta, 2015.
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005.
- Sugianto dan Leliya, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Sebuah Analisis dalam Prespektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Sri Hajati dan Agus Sekarmadji, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2011.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media, Surabaya, 2010.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012.

Winahyu Erwatiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

### **Jurnal/Makalah**

Afifuddin Manan dan Amrullah, *Hak Pemilikan Atas Tanah (Studi Kasus di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, [www.theacehinstitute.org](http://www.theacehinstitute.org) diunduh pada Hari Rabu, 23 Oktober 2019, jam 19.44 WIB.

Eman Ramelan, 2000, *Hak Pengelolaan Setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999*, Majalah YURIDIKA, Vol. 15 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

*Badan Pertanahan Nasional, Pengarahan Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah pada Rapat Konsultasi Teknis Para Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Seluruh Indonesia*, Jakarta. 2013.

### **Internet**

<https://bnpb.cloud/dibi/>, Tanggal 28 Mei 2020, Pukul 10.32 Wita

<https://palukota.bps.go.id/publication/2020/09/28/56194cbc8cbfd41001a83d69/kecamatan-palu-barat-dalam-angka-2020.html>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 02.33 Wita

Situs Resmi Pemerintah Kota Palu, Kecamatan Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, <http://bappeda.palukota.go.id/wp-content/uploads/2018/03/BAB-II.-RPJP.1.pdf>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 02.53 Wita

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulang Bencana Daerah